

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Padang adalah:
 - a. Memerlukan kerja sama antar instansi, seperti TNI/Polri, BASARNAS, Dinas Pekerjaan Umum, BMKG, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
 - b. Pengelolaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang melibatkan BNPB sebagai otoritas pusat sangat penting untuk mendukung seluruh proses penanggulangan bencana.
 - c. Penanggulangan bencana dilakukan dengan beberapa tahap, mulai dari kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan, rehabilitasi, hingga rekonstruksi.
 - d. Pelaksanaan penanggulangan bencana yang efektif memerlukan koordinasi yang baik antar berbagai pihak dan pemenuhan sarana prasarana yang memadai.
 - e. Keberhasilan dalam implementasi kebijakan sangat bergantung pada kerjasama yang solid dan kesiapan dalam menghadapi bencana secara cepat dan tepat.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah:
 - a. Masalah komunikasi di lapangan, seperti keterbatasan infrastruktur komunikasi, keterlambatan informasi, ketidakjelasan saluran komunikasi, serta hambatan bahasa dan terminologi yang dapat menyebabkan miskomunikasi.
 - b. Perbedaan data, yang dapat muncul karena ketidakakuratan data lapangan, kurangnya koordinasi antar lembaga, perbedaan interpretasi data, serta kesulitan akses ke daerah terdampak bencana.
3. Upaya-upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengatasi kendala-kendala banjir di Kota Padang adalah:
 - a. Penggunaan teknologi satelit untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur komunikasi, penguatan sistem komunikasi darurat, dan peningkatan pelatihan bagi petugas dan relawan.
 - b. Mengembangkan sistem pemantauan yang lebih adaptif dengan memanfaatkan teknologi yang lebih canggih seperti drone dan aplikasi berbasis digital untuk memperbarui data secara berkala.
 - c. Membangun sistem komunikasi yang terintegrasi agar informasi dapat dipertukarkan secara lebih efisien dan respons terhadap bencana dapat dilakukan dengan tepat waktu.

- d. Meningkatkan infrastruktur transportasi serta melibatkan relawan lokal untuk mempermudah akses ke daerah yang sulit dijangkau.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang memperluas program edukasi dan pelatihan mitigasi bencana di tingkat desa atau kelurahan, sehingga masyarakat lebih siap dalam menghadapi bencana dan berperan aktif dalam penanggulangan bencana.
2. Agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang meningkatkan infrastruktur komunikasi, terutama di daerah-daerah terpencil yang rawan bencana. Penyediaan perangkat komunikasi cadangan dan teknologi yang lebih canggih, seperti jaringan satelit atau perangkat radio, akan sangat membantu dalam memastikan komunikasi tetap terjaga meskipun terjadi kerusakan infrastruktur.
3. Agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang meningkatkan sistem pengumpulan dan pemrosesan data secara terintegrasi. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi pemetaan berbasis geospasial yang dapat memberikan data yang lebih akurat dan terbaru.